

BAB II

KONDISI OBYEKTIF LEMBAGA OMBUDSMAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

A. Sejarah Provinsi Banten

Banten atau dahulu dikenal dengan nama Bantam pada masa lalu merupakan sebuah daerah dengan kota pelabuhan yang sangat ramai, serta dengan masyarakat yang terbuka, dan makmur. Banten pada abad ke-5 merupakan bagian dari kerajaan Tarumanegara. Salah satu prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara adalah Prasasti Cidanghiyang atau prasasti Lebak, yang ditemukan di Kampung Lebak di tepi Cidanghiyang, Kecamatan Munjul, Pandeglang, Banten. Prasasti ini baru ditemukan Tahun 1947, dan berisi 2 baris kalimat berbentuk puisi dengan huruf Pallawa dan Bahasa Sanskerta. Isi prasasti tersebut mengagungkan keberanian Raja Purnawarman. Setelah runtuhnya kerajaan Tarumanegara (menurut beberapa sejarawan ini akibat serangan Kerajaan Sriwijaya), kekuasaan dibagian barat Pulau Jawa dan Ujung Kulon sampai Ci Serayu dan Kali Brebes dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda.¹

Banten merupakan salah satu bumi intelektualitas yang banyak melahirkan ulama ilmiah dan pejuang. Syekh Nawawi Al-Bantani yang berasal dari Banten, menjadi salah satu contoh teladan bagi kemajuan perkembangan gerakan keagamaan Islam di Indonesia. Keulamaan beliau sangat dihormati oleh kalangan tokoh-

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Banten#Sejarah> diakses pada tanggal 18 Oktober 2017 pukul 11:25 WIB

tokoh Islam Indonesia pada abad ke-18, tidak pelak lagi, banyak murid yang dulu berguru kepadanya menjadi tokoh yang punya pengaruh besar di nusantara. Di antara yang pernah menjadi murid beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama (NU) almarhum Hadraatussyekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari.

Banten tidak hanya dikenal dengan intelektualitas keulamaannya tetapi juga dari segi masa lampau, daerah ini menyimpan segudang sejarah yang banyak dikaji oleh peneliti dari dalam maupun manca. Daerah yang dikenal dengan permainan tradisional *debusnya* ini, banyak sekali dibahas dalam literatur-literatur asing. Claude Guillot, seorang sejarawan dan arkeolog asal Prancis, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya akan kekayaan sumber-sumber sejarah Banten, ia berujar bahwa, "... Banten adalah negeri yang kaya sekali akan sumber-sumber sejarah. Kerajaan ini bukan hanya telah menulis sejarahnya sendiri, melainkan juga merangsang banyak tulisan dari pengunjung-pengunjung asing, khususnya Eropa..."²

Kekhasan dan keunikan sumber sejarah Banten yang beraneka ragam tidak bisa lepas dari letak geografis yang berada di ujung barat Pulau Jawa dan berbatasan Pulau Sumatera dengan Selat Sunda sebagai pemisah kedua wilayah

Letak geografisnya menjadikan Banten -meminjam istilah Guillot- termasuk ke dalam "dua dunia" yaitu Jawa dan Sumatera yang keduanya memiliki perbedaan mendasar. Posisi Banten berada di perbatasan antara dua tradisi utama nusantara, yaitu tradisi

² Claude Guillot, *Sejarah dan Peradaban Abad X-XVII*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), h. 11-12.

Kerajaan Jawa dan tempat perdagangan Melayu. Keunikan itu ternyata mempengaruhi komposisi budaya masyarakat Banten yang multikultural dan sejak dahulu menjadi daerah ataupun kota kosmopolitan yang mempunyai jaringan dagang sampai ke negeri Inggris pada abad ke-16.³

Memotret perkembangan Banten yang kini tengah menjadi salah satu daerah industri nusantara,⁴ tidak terlepas dari sejarah yang menyelimuti sebelumnya. Sejak awal abad ke-16, pelabuhan Banten merupakan salah satu pelabuhan besar Kerajaan Pajajaran setelah Sunda Kelapa yang ramai dikunjungi para pedagang asing. Wilayah ini dikuasai oleh suatu kerajaan bercorak Hindu dan merupakan daerah vassal dari Kerajaan Pajajaran, nama kerajaan itu terkenal dengan nama Banten Girang. Penguasa terakhir Kerajaan Banten Girang adalah Pucuk Umun. Kebesaran Kerajaan Banten Girang sudah masyhur terdengar dan didatangi oleh para pedagang asing yang terlibat dalam perdagangan lada. Maklum saja, lada merupakan komoditas yang banyak terdapat di wilayah kerajaan yang letaknya sekitar 13 kilometer dari arah pesisir laut ini. Selain itu, kegiatan metalurgi atau pengolahan bijih besi menjadi sumber

³ Karangan yang ditulis Mrs. Fruin Mess tahun 1923 membahas kunjungan utusan Banten ke London tahun 1682. Ada dua utusan dari Banten yang diterima menjadi tamu kehormatan Raja Inggris, Charles II, selama tiga setengah bulan. Kedua utusan itu bernama Kyai Ngabehi Naya Wipraya dan Kyai Ngabehi Jaya Sedana, potret kedua tokoh tersebut berhasil ditemukan dari Museum of Mankind di London. Lihat Lukman Hakim, Banten dalam Perjalanan Journalistik. (Pandeglang: Divisi Publikasi Banten Heritage, 2006), h. 30.

⁴ Pengembangan industri di Banten dimulai semenjak Tahun 1970-an ketika pemerintah membangun kawasan industri di sana. Pabrik-pabrik raksasa menjamur, sebagian diantaranya perusahaan asing. Hingga akhir 2007, sedikitnya ada 1.500 industri di Banten. Lihat: Sidik Pramono (Ed.), Ekspedisi Anjer Panaroekan Laporan Journalistik Kompas: 200 Tahun Anjer Panaroekan, Jalan (Untuk) Perubahan (Jakarta: Kompas, 2008), h. 252.

pendapatan bagi masyarakat di Kerajaan Banten Girang. Banyaknya temuan beberapa alat-alat dalam kegiatan metalurgi, berupa bungkah bijih besi, sebuah batu yang pernah menjadi dasar sebuah dapur pengecoran besi, sejumlah besar terak besi dan sisasisa benda besi di bekas situs kerajaan yang disebut juga Banten Hulu ini, cukup menyakinkan bahwa kebesaran Kerajaan Banten Girang salah satunya disebabkan oleh kegiatan ini. Kerajaan Banten Girang juga sudah memiliki infrastruktur kota secara menetap. Kerajaan ini dikelilingi oleh bentang alamiah seperti perbukitan dan hutan dan pagar buatan berupa parit-parit yang tidak lain berfungsi sebagai benteng pelindung kerajaan. Seirama dengan itu, Sungai Cibanten yang mengalir di pusat kota seperti menjadi berkah bagi Kerajaan Banten Girang. Sungai inilah yang menjadi alat transportasi utama dari pedalaman menuju ke pelabuhan. Berkembangnya agama Islam secara bertahap di wilayah Banten pada akhirnya menggantikan posisi politis Banten Girang sebagai kerajaan bercorak Hindu. Era Kesultanan pun perlahan mulai menggoreskan tinta sejarah di Tatar Banten. Penting untuk dikaji, adalah mengenai perkembangan Kesultanan Banten sekitar abad ke-16 dan ke-17, yang menurut kabar dari orang Perancis saat itu melihat Kesultanan Banten sebagai kota kosmopolitan bersanding dengan Kota Paris, Perancis.⁵

⁵ Dalam abad ke-17, para perintis luar negeri Perancis membuka salah satu kantor perwakilannya yang pertama di Banten, suatu pilihan yang beralasan dan tak terelakkan karena Banten dengan 150.000 penduduknya termasuk ke dalam kota-kota besar yang paling dinamis dan kosmopolitan pada masa itu. Jika dibandingkan, Paris hanyalah kota yang sangat kecil dengan pengaruh yang sangat terbatas di kawasan itu saja. Lihat: Bernard Dorleans, *Orang Indonesia & Perancis Dari Abad XVI Sampai Dengan Abad XX*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2006), h. xxxvii.

Letaknya yang strategis antara Malaka dan Gresik, telah menjadikan Kesultanan Banten sebagai salah satu bandar internasional yang berpengaruh di Nusantara baik secara sosial, politik, ekonomi, budaya maupun agama. Kapalkapal yang berlabuh di Bandar Banten berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan dari negara asing terutama Cina, India, Arab dan lebih kemudian Eropa.⁶

Konsep penataan ruang Kesultanan Banten pertama kali terlihat dari keputusan Sunan Gunung Jati. yang memerintahkan kepada putranya (Maulana Hasanuddin) untuk melakukan ‘hijrah pemerintahan.’ Pusat pemerintahan Kerajaan Banten yang semula di daerah pedalaman di Banten Girang (tiga kilometer dari Kota Serang), dialihkan ke pesisir Teluk Banten. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 1 Muharram tahun 933 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Oktober 1526. Tanggal perpindahan ini kemudian dijadikan ‘hari jadi (HUT)’ Kabupaten Serang. Keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari pedalaman ke pesisir merupakan langkah strategis, karena pada saat itu Teluk Banten merupakan kawasan yang cukup ramai didatangi para pedagang dari berbagai wilayah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan perpindahan ini, Kesultanan Banten menjadi daerah terbuka untuk tujuan perdagangan. Kesultanan Banten pun lebih dinamis, karena menjadi daerah tujuan pedagang dari berbagai belahan dunia.⁷

⁶ Hasan Muarif Ambary, *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 117.

⁷ Tb. A. Fauzi S, (2009), *Konsep Tata Ruang Wilayah Era Kesultanan Banten*. Tersedia pada <http://www.radarbanten.com>. diunduh pada tanggal 28 Juli 2017.

Sultan pertama Banten, Maulana Hasanuddin, memerintah tahun 1527- 1570. Pada masa pemerintahan Hasanuddin, kekuasaan Kesultanan Banten diperluas ke Lampung hingga Sumatera Selatan. Pasca Maulana Hasanuddin, Kesultanan Banten menunjukkan signifikansi kemajuan sebagai sebuah kerajaan Islam di Nusantara. Sultan Maulana Yusuf, sebagai pengganti ayahnya, memimpin pembangunan Kesultanan Banten di segala bidang. Strategi pembangunan lebih dititikberatkan pada pengembangan infrastruktur kota, pemukiman penduduk, keamanan wilayah, perdagangan dan pertanian.⁸

Diawali dengan penguasaan Kota Pelabuhan Banten, yang dilanjutkan dengan merebut Banten Girang dari Pucuk Umun pada Tahun 1527, Maulana Hasanuddin mendirikan Kesultanan Banten di wilayah bekas Banten Girang. Dan pada Tahun 1579, Maulana Yusuf, penerus Maulana Hasanuddin, menghancurkan Pakuan Pajajaran, ibu kota atau pakuan (berasal dari kata pakuwan) Kerajaan Sunda. Dengan demikian Pemerintah di Jawa Barat dilanjutkan oleh Kesultanan Banten. Hal itu ditandai dengan dirampasnya Palangka Sriman Sriwacana, tempat duduk kala seorang raja dinobatkan, dari Pakuan Pajajaran ke Surasowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu terpaksa diboyong ke Banten karena tradisi politik waktu itu “mengharuskan” demikian. Pertama, dengan dirampasnya Palangka tersebut, dipakuan tidak mungkin lagi dinobatkan raja baru. Kedua, dengan memiliki Palangka itu, Maulana Yusuf

⁸ Oni Hanif Triana (Ed.), *Proses Islamisasi Di Banten* (Cuplikan Buku Catatan Masa Lalu Banten Halwany Michrob & Mudjahid Chudari). (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2003), h. 38.

mengklaim sebagai penerus kekuasaan Kerajaan Sunda yang “sah” karena buyut perempuannya adalah puteri Sri Baduga Maharaja sementara disisi lain para Kandaga Lante dari Kerajaan Pajajaran secara resmi menyerahkan seluruh atribut dan perangkat kerajaan beserta abdi kepada Kerajaan Sumedang Larang untuk meneruskan Kelanjutan Kerajaan Sunda atau Pajajaran yang merupakan trah Siliwinagi.

Ketika sudah menjadi pusat Kesultanan Banten, sebagaimana dilaporkan oleh J. de Barros, Bantam merupakan pelabuhan besar di Asia Tenggara, sejajar dengan Malaka dan Makassar. Kota Bantam terletak di pertengahan pesisir sebuah teluk, yang lebarnya sampai tiga mil. Kota itu panjangnya 850 depa. Di tepi laut kota itu panjangnya 400 depa; masuk ke dalam ia lebih panjang. Melalui tengah-tengah kota ada sebuah sungai yang jernih, di mana kapal jenis jung dan *gale* dapat berlayar masuk. Sepanjang pinggiran kota ada sebuah anak sungai, di sungai yang tidak seberapa lebar itu hanya perahu-perahu kecil saja yang dapat berlayar masuk. Pada sebuah pinggiran kota itu ada sebuah benteng yang dindingnya terbuat dari bata, dan lebarnya tujuh telapak tangan. Bangunan-bangunan pertahanannya terbuat dari kayu, terdiri dari dua tingkat, dan dipersenjatai dengan senjata yang baik. Di tengah kota terdapat alun-alun yang digunakan untuk kepentingan kegiatan ketentaraan, dan kesenian rakyat, dan sebagai pasar di pagi hari. Istana raja terletak di bagian selatan alun-alun. Di sampingnya terdapat bangunan datar yang ditinggikan, dan beratap, disebut Srimanganti, yang digunakan sebagai tempat raja bertatap

muka dengan rakyatnya. Di sebelah barat alun-alun didirikan sebuah masjid agung.

Litografi berdasarkan lukisan oleh Abraham Salm dengan pemandangan di Banten (1865-1872). Pada awal abad ke-17 Masehi, Bantam merupakan salah satu pusat perniagaan penting dalam jalur perniagaan internasional di Asia. Tata administrasi modern pemerintahan, dan kepelabuhan sangat menunjang bagi tumbuhnya perekonomian masyarakat. Daerah kekuasaannya mencakup juga wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Lampung. Ketika orang Belanda tiba di Bantam untuk pertama kalinya, orang Portugis telah lama masuk ke Bantam. Kemudian orang Inggris mendirikan loji di Bantam, dan disusul oleh orang Belanda.

Selain itu, orang-orang Perancis, dan Denmark pun pernah datang di Bantam. Dalam persaingan antara pedagang Eropa ini, Belanda muncul sebagai pemenang. Orang Portugis melarikan diri dari Bantam (1601), setelah armada mereka dihancurkan oleh armada Belanda di perairan Bantam. Orang Inggris pun tersingkirkan dari Batavia (1619) dan Bantam (1684) akibat tindakan orang Belanda.

Pada 1 Januari 1926 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan untuk pembaharuan sistem desentralisasi, dan dekonsentrasi yang lebih luas. Di Pulau Jawa dibentuk pemerintahan otonom provinsi. *Provincie West Java* adalah provinsi pertama yang dibentuk di wilayah Hindia Belanda yang diresmikan dengan surat keputusan tanggal 1 Januari 1926, dan diundangkan dalam Staatsblad (Lembaran Negara) 1926 No. 326, 1928 No. 27 jo No. 28, 1928 No. 438, dan 1932 No. 507. Banten

menjadi salah satu keresidenan yaitu *Bantam Regentschappen* dalam Provincie West Java di samping Batavia, Buitenzorg (Bogor), Preanger (Priangan), dan Cirebon.⁹

B. Letak Geografis Provinsi Banten

Banten merupakan provinsi yang berdiri berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 secara administratif, terbagi atas 4 Kabupaten dan 4 Kota yaitu : Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kota Cilegon, dengan luas 9.160,70 Km². Letak geografis Provinsi Banten pada batas Astronomi 105°1'11² - 106°7'12² BT dan 5°7'50² - 7°1'1² LS, dengan jumlah penduduk sebesar 12.548.986 Jiwa.

Letak di Ujung Barat Pulau Jawa memposisikan Banten sebagai pintu gerbang Pulau Jawa dan Sumatera dan berbatasan langsung dengan wilayah DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Posisi geostrategis ini tentunya menyebabkan Banten sebagai penghubung utama jalur perdagangan Sumatera – Jawa bahkan sebagai bagian dari sirkulasi perdagangan Asia dan Internasional serta sebagai lokasi aglomerasi perekonomian dan permukiman yang potensial. Batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Barat dengan Selat Sunda, serta di bagian Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sehingga wilayah ini mempunyai sumber daya laut yang potensial.¹⁰

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Banten#Sejarah> diakses pada tanggal 20 Juli 2017 pukul 17:10 WIB

¹⁰ <https://www.bantenprov.go.id/read/program-kerja.html> di akses pada tanggal 28 Juli 2017, pukul 03:44 Wib.

C. Profil Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten

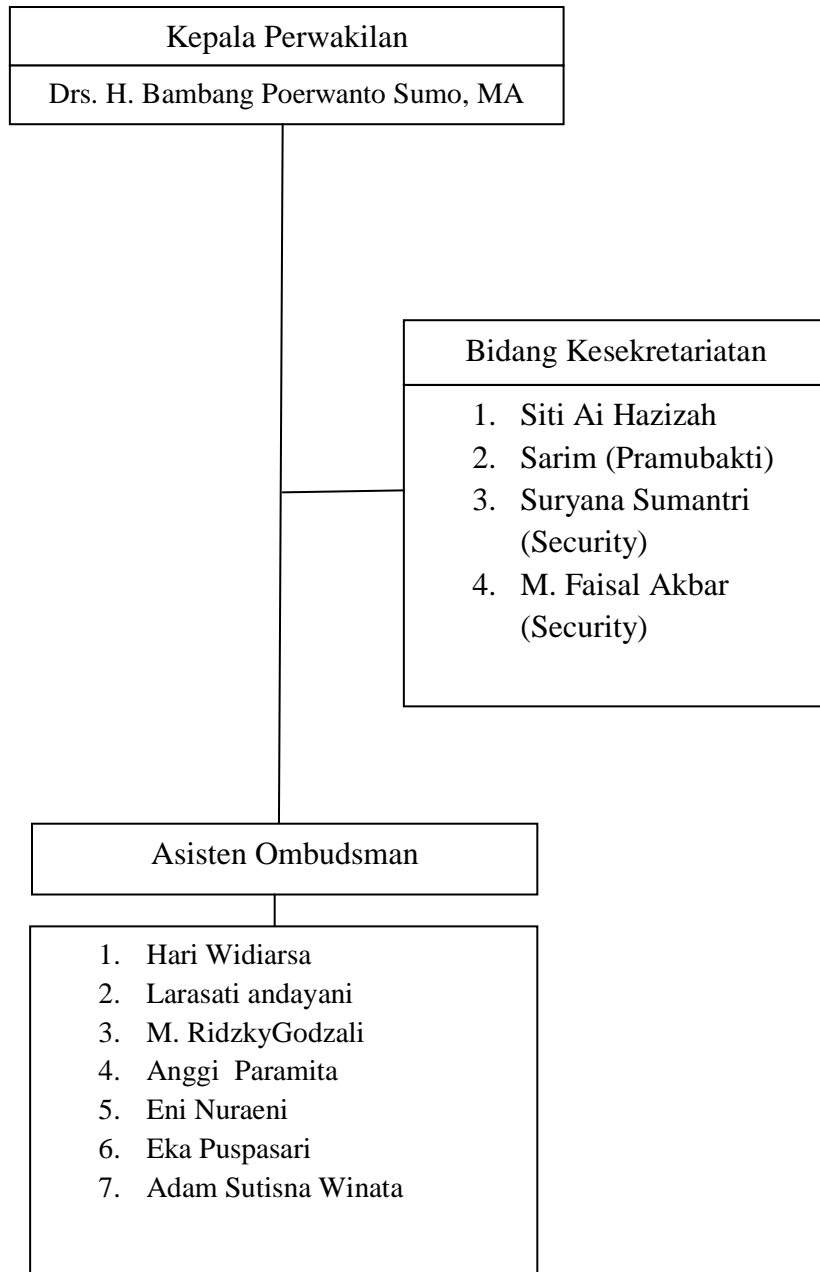
1. Sejarah Terbentuknya Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten

Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten merupakan perwakilan yang dibentuk pada tanggal 14 Maret 2013 sesuai dengan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 022/ORI-SK/II/2013 tentang Pembentukan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Sulawesi Barat.

2. Sifat dan Kedudukannya

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga Negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga Negara dan instansi pemerintah lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Banten dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Banten.

3. Struktur Ombudsam RI perwakilan Provinsi Banten



D. Visi Misi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten

Visi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten:

“Mewujudkan Pelayanan Prima yang menyejahterakan dan Berkeadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia”,

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan pengawasan, menyampaikan saran dan rekomendasi serta mencegah maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik.
2. Mendorong penyelenggara negara dan pemerintah agar lebih efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat dan supremasi hukum yang berintikan pelayanan, kebenaran serta keadilan.
4. Mendorong terwujudnya sistem pengaduan masyarakat yang terintegritas berbasis teknologi informasi.